

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Studi pokok dalam ilmu hubungan internasional yang menarik untuk di kaji adalah kebijaksanaan pertahanan keamanan suatu negara. Kebijaksanaan pertahanan keamanan Jepang pasca perang dingin merupakan salah satu obyek analisa yang penuh dengan fenomena-fenomena politik, ekonomi dan keamanan yang menarik untuk di analisa.

Implikasi atas kebijaksanaan pertahanan keamanan menimbulkan reaksi keras dari Amerika. Sehingga ada dua alasan untuk menjawab pertanyaan mengapa memilih judul **"Kebijaksanaan Pertahanan Keamanan Jepang Pasca Perang Dingin di Asia Pasifik"**.

Pertama adalah bahwa kebijaksanaan Jepang sejak berakhirnya perang dingin hanya dikonsentrasikan untuk mengamankan kepentingan ekonominya yang telah memenuhi syarat bagi dilakukannya penelitian, sehingga judul dan permasalahan yang kemudian diajukan memiliki dasar yang kuat. Kedua, karena kemampuan militer Jepang mengalami trauma setelah perang dingin dan komitmen Jepang dalam bidang keamanan yang merosot di kawasan Asia Pasifik sehingga Jepang diharuskan untuk memikirkan kebijaksanaan

B. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya perang dingin pada akhir tahun 1989 yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan *collapse-nya* komunisme di Uni Soviet menjadikan situasi dunia semakin tidak menentu dan penuh dengan fluktuasi. Negara-negara yang semula terseret ke dalam pusaran perang dingin baik yang masuk ke orbit Amerika Serikat (AS) atau blok Barat maupun yang masuk orbit Uni Soviet atau blok Timur, setelah perang dingin usai dipaksa oleh keadaan untuk menyadari posisi mereka masing-masing. Mulai saat ini posisi mereka terlepas secara relatif dari kekuasaan dua *super power* yang semula menjadi kutubnya.

Menurut para ahli, dunia pasca dingin akan diwarnai dengan terjadinya konflik-konflik terbatas yang bersumber pada masalah-masalah perbatasan, etnis dan religi. Disintegrasi yang terjadi di bekas Uni Soviet dan kekacauan di bekas Yugoslavia serta konflik-konflik terbatas di wilayah lainnya merupakan contoh konkrit dari ramalan itu. Demikian halnya dengan perubahan tatanan dunia dari *bipolar* menjadi *multipolar* cenderung mengarah ke pembentukan regionalisme. Pembentukan blok-blok perdagangan NAFTA, EFTA (MEE), APEC dan lain sebagainya merupakan contoh dari fenomena itu.

Tidak terkecuali di kawasan Asia Pasifik, dampak berakhirnya perang dingin mendorong negara-negara di kawasan ini membentuk konfigurasi-konfigurasi baru dalam berhubungan internasional!

mengatakan bahwa perang dingin belum selesai di wilayah Asia Pasifik, terbukti dengan masih berdirinya negara-negara komunis di kawasan ini (RRC, Korea Utara, dan Vietnam) namun mencairnya kebekuan akibat perang dingin sudah mulai terasa di negara-negara ini.

Menjelang abad 21 negara-negara besar semakin memandang kawasan Asia Pasifik menjadi semakin bertambah penting. Oleh sebagian orang di kawasan ini diramalkan akan terjadi Abad Pasifik yaitu abad dimana seluruh kegiatan ekonomi, politik dan kebudayaan dunia berpusat disini. Mengingat begitu strategisnya arti kawasan ini maka stabilitas kawasan sangat diperlukan. Dan dengan semakin merosotnya hegemoni AS semenjak berakhirnya perang Vietnam, kemudian dikaitkan dengan upaya-upaya pembentukan konfigurasi *brin*; dibidang politik dan keamanan maka kehadiran Jepang di kawasan ini tidak dapat dihindarkan.

Selain itu situasi politik dan keamanan di Asia Pasifik, tempat dimana Jepang berada tidak pernah lepas dari pengaruh empat besar yakni AS, Rusia, RRC dan Jepang sendiri. Karena itu muncul kekhawatiran bahwa kepergian AS dari Philipina pada akhir 1992 lalu akan merusak keseimbangan kekuatan (*balance of power*) yang telah dicapai di kawasan ini sejak 40 tahun terakhir. Sebab meskipun di kawasan Asia Pasifik telah terjadi perubahan mendasar menyusul berakhirnya perang dingin tetapi kekuatan militer yang dimiliki empat besar AS, Rusia (yang menggantikan Uni Soviet), RRC dan Jepang masih tetap dipertahankan bahkan di beberapa negara lain di seperti Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan dan negara-negara

cenderung meningkat.

Selama ini timbul spekulasi kalau AS pergi dari Philipina maka akan terjadi kekosongan. Kekosongan ini tentunya akan mengundang salah satu dari tiga besar untuk menggantikannya. Melihat keadaan ekonomi ketiga negara saat ini diperkirakan hanya Jepang lah yang mampu menggantikan peran yang ditinggalkan AS. Sementara RRC dan Rusia akan disibukkan dengan pembangunan di dalam negerinya. Apalagi kawasan Asia Pasifik dinilai sangat vital bagi Jepang. Sekitar 80% impor minyak bumi Jepang diangkut melalui kawasan ini. Demikian pula impor bahan mentahnya 70% diambil dan diangkut melalui kawasan ini. Melihat arti penting Asia Pasifik bagi Jepang maka sangat logis bila timbul kekhawatiran dari negara-negara lain di kawasan ini seandainya Jepang menggantikan posisi AS dengan mengisi kekosongan itu. Masalahnya sekarang adalah apakah Jepang siap hanya dengan predikat adidaya ekonomi tanpa diimbangi kemampuan militer yang memadai. Memang banyak kendala yang harus dihadapi oleh Jepang untuk bisa berperan secara lebih besar dalam bidang pertahanan keamanan apalagi bila diarahkan ke luar. Selain kendala internal berupa konstitusi anti perangnya, Jepang juga akan menghadapi keberatan-keberatan psikologis dari lingkungan sekitarnya.

Sementara itu mitologi kuno Jepang, agar tetap kuat dan disegani Jepang harus memiliki dan mempertahankan tiga benda yang diwariskan oleh dewanya. Ketiga benda itu adalah *Diamond*, *Mirror* dan *Sword*

pengertian yang berbeda. *Diamond* atau permata diartikan dengan kekuatan ekonomi, *mirror* atau cermin diartikan dengan keunggulan teknologi dan *sword* atau pedang dipercaya sebagai kekuatan militer. Untuk dua hal yang pertama yaitu kekuatan ekonomi dan keunggulan teknologi dunia sudah mengakuinya. Sementara itu yang ketiga, kekuatan militer, meskipun telah mengalami peningkatan yang begitu besar namun masih menjadi kontroversi baik di dalam negeri maupun di luar negeri terutama bila dikaitkan dengan Artikel 9 Konstitusi Jepang.¹

Seiring dengan mitos di atas tujuan nasional Jepang setelah revolusi Meiji 1868 adalah *Fukoku-Kyohei* atau *Rich Country-Strong Army*. Slogan *Fukoku-Kyohei* berarti negara makmur sejahtera dengan militer yang kuat. Namun setelah kekalahan dalam PD II maka *Kyohei* untuk sementara dihilangkan dari keinginan Jepang dan *Fukoku* menjadi satu-satunya tujuan nasional. Tetapi dengan surutnya superioritas AS disertai dengan adanya tekanan internal maupun eksternal yang semakin kuat agar Jepang mau menerima tanggungjawab internasional secara lebih besar maka sejak permulaan 1970-an *Fukoku* sebagai tujuan nasional mulai dimunculkan lagi.²

Kebijaksanaan keamanan Jepang sejak berakhirnya PD II dibentuk sebagai reaksi terhadap perang itu sendiri. Kerenanya tidak mengejutkan

¹ Secara lengkap Artikel 9 Konstitusi Jepang berbunyi : "Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as a means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, sea and air force, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized. dalam Japan Echo

² Sang-Il Han, *Korea And World Affairs*, 1984, hal. 708

kalau Jepang benar-benar enggan memainkan peran politik atau militernya di pentas internasional. Kebijakan Jepang saat itu hanya dikonsentrasikan pada bidang ekonomi. Pemerintah Jepang secara spontan dan unilateral mengambil tindakan tegas untuk membatasi aktivitas-aktivitas militernya. Hal itu telah berlangsung demikian lama sebagai interpretasi atas Artikel 9 Konstitusinya yang secara tegas menolak perang sebagai kedaulatan bangsa, menolak digunakannya kekuatan senjata dalam menyelesaikan pertikaian internasional dan tidak mengakui adanya potensi perang. Jepang juga telah menyatakan taat pada tiga prinsip non nuklir yaitu tidak memiliki, tidak memproduksi dan tidak mengizinkan masuknya senjata-senjata nuklir ke wilayah Jepang. Dan mengadopsi kebijakan pertahanan yang efektif bagi SDF serta melarang ekspor senjata dan membatasi budget pertahannya di bawah 1% GNP.

Menyadari dua hal yang bertolak belakang yaitu di satu sisi Jepang melihat arti penting Asia Pasifik pasca perang dingin dan di sisi lain persepsi Jepang yang dituangkan dalam artikel 9 dan mitologi Jepang kuno yaitu *diamond, mirror, sword* yang berarti kekuatan ekonomi, keunggulan teknologi dan kekuatan militer Jepang.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas maka dapat di rumuskan suatu pokok permasalahan : **Mengapa Jepang meningkatkan Kebijakan Pertahanan Keamanan di Asia Pasifik Pasca Perang Dingin.**

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka dasar penulisan ini bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan serta memilih konsep dalam menyusun hipotesa. Untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan di atas, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang berkaitan erat dengan judul ini yaitu:

1. Konsep "*Balance of Power*"

Kecenderungan "*arm race*" yang terjadi di Asia Pasifik pasca perang dingin disebabkan oleh upaya-upaya pengembangan kekuatan militer diantara negara-negara dikawasan tersebut. Masing-masing negara berupaya mengimbangi kekuatan negara-negara lain demi keamanan negaranya. Itulah sebabnya mengapa perimbangan kekuatan menjadi perlu dibicarakan. Menurut Morgenthau, *Balance of Power* adalah suatu keadaan nyata, dimana kekuasaan terbagi kurang lebih sama diantara beberapa banyak negara.³

Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Mohtar Mas'ood, yang mengatakan *Balance of Power*:

“Sebagai suatu ekuilibrium, dimana variabel-variabel utamanya begitu erat, sehingga perubahan disatu variabel pasti akan menimbulkan perubahan di variabel lain.”⁴

Dengan kata lain, dalam kedua pandangan ini suatu negara secara otomatis akan menyesuaikan diri kalau ada peningkatan kekuatan pada negara lain dalam sistem itu dengan cara meningkatkan sumber-sumber kekuatan mereka sendiri.⁵ Pendekatan ini juga berasumsi bahwa selama masih ada distribusi sumberdaya yang cukup seimbang diantara lima atau lebih aktor, kebijaksanaan mereka akan tetap moderat, dan upaya oleh satu aktor untuk memperoleh posisi hegemoni akan bisa digagalkan oleh kekuatan pengimbangannya.

Ahli sejarah Arnold Toynbee berpendapat bahwa:

“ *Balance of Power* bekerja untuk menjaga agar kaliber rata-rata negara-negara tetap rendah dalam setiap kriteria pengukur kekuatan politik ... suatu negara yang mencoba meningkatkan kalibernya diatas kaliber rata-rata yang berlaku, secara hampir otomatis, akan menjadi sasaran tekanan dari semua negara-negara anggota konstelasi politik yang sama.”⁶

Model *Balance of Power* sebagai ekuilibrium ini memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, pada kenyataannya penyesuaian kekuatan itu tidak berjalan otomatis, tetapi tergantung pada kemampuan para negarawan untuk melihat dan menafsirkan perubahan secara tepat. *Kedua*,

⁴ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin & Metodologi*, Edisi Revisi, hal. 135

⁵ *Ibid*, hal. 136

dalam kasus-kasus spesifik sangat sulit mengetahui apakah perubahan-perubahan dalam sumberdaya itu betul-betul meningkatkan atau mengurangi pengaruh satu aktor. *Ketiga*, model ini tidak memperhitungkan tujuan dan motivasi negara-negara tersebut, karena tidak semua negara menggunakan pengaruhnya untuk terus melakukan ekspansi atau agresi, tetapi hanya melakukan sedikit peningkatan sumber daya dan kekuatan demi memperoleh pengaruh dalam politik internasional.

Untuk menciptakan perdamaian dan keamanan serta mencegah munculnya kekuatan hegemoni baru dikawasan Asia Pasifik setelah kekuatan penyeimbangannya (AS) ditarik, masing-masing negara dikawasan ini secara otomatis menyesuaikan diri dengan cara meningkatkan sumber-sumber kekuatan mereka, yaitu melalui pengembangan kekuatan militer, disamping kekuatan ekonomi. Dalam hal ini Jepang berusaha melakukan pengembangan kekuatan militernya untuk mengimbangi peningkatan kekuatan militer yang dilakukan negara-negara tetangganya di Asia Pasifik, seperti Cina, Korea Utara, India, dan lain-lain, yang pada pasca perang dingin ini semakin menunjukkan kecenderungan "*arm race*". Upaya Jepang ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk memperoleh posisi hegemoni regional, akan tetapi hanya untuk mengimbangi kekuatan agar tercipta suatu keadaan nyata dimana kekuasaan terbagi kurang lebih sama, sehingga akan tercipta kestabilan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keamanan dan kelancaran kepentingan Jepang secara menyeluruh.

Sementara itu, setiap peningkatan kekuatan militer y
negara-negara lain, baik itu dilakukan oleh Jepang, Cina, Kor

mengundang balasan dari semua negara anggota konstelasi politik di Asia Pasifik. Artinya setiap peningkatan persenjataan militer yang dilakukan Jepang melebihi negara lain di Asia Pasifik, akan mendapat kecaman dan tekanan serta tindakan balasan serupa dari negara-negara lain tersebut yaitu Cina, Korea, India, Taiwan, dan lain-lain. Sebaliknya jika Cina yang melakukannya juga akan mendapat kecaman dan tekanan dan balasan dari Jepang, Korea, India, dan lainnya. Begitu pula jika hal tersebut dilakukan oleh Korea Utara, India, atau Taiwan. Dan begitu seterusnya sehingga terciptalah suatu kecenderungan "arm race", dan keadaan yang disebut dilema keamanan atau "Security Dilemma".

2. Konsep Dilema Keamanan (*Security Dilemma*)

Masalah pertahanan dan keamanan selalu menjadi masalah yang paling penting dalam politik luar negeri suatu negara. Kadang keduanya merupakan basis bagi eksistensi negara dan merupakan prasyarat bagi tercapainya tujuan-tujuan negara yang lain. Masalah keamanan suatu negara ditentukan oleh apa yang dilakukan negara lain. Di sinilah terletak "Security dilemma" yang dihadapi oleh setiap negara, yaitu dalam upayanya untuk memelihara atau meningkatkan keamanannya sendiri, sebuah negara dapat mengambil langkah-langkah yang berdampak mengurangi keamanan negara-negara lainnya dan pada giliran berikutnya negara-negara ini akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk menetralkan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh negara pertama dan yang mungkin malahan dapat mengancam keamanan negara pertama.

Negara yang pertama kemudian akan merasa ter
terpaksa mengambil tindakan lanjut yang dapat memprovol

berarti bahwa spiral atau rantai aksi-reaksi dapat terjadi diantara dua negara atau lebih sehingga masing-masing akan mengeluarkan anggaran belanja persenjataan yang terus makin membesar dan ini berarti bahwa mereka tidak semakin aman, tetapi justru semakin mendekati ambang perang yang makin berbahaya.⁷

Menurut Barry R. Posen, definisi tentang dilema keamanan (*security dilemma*) adalah : "... *what one does to enhance one's own security causes reactions that, in the end can make one less secure*". Dari definisi ini dapat ditafsirkan bahwa suatu negara dalam meningkatkan keamanannya menimbulkan reaksi negara-negara lain.

Dalam meningkatkan kemampuan persenjataannya, Jepang bertujuan perdamaian, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan keamanannya sendiri dan tidak mempunyai rencana agresi terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Akan tetapi dalam lingkungan Internasional yang pada dasarnya anarkis, negara-negara di Asia Pasifik seperti Cina, Korea Utara, India dan lain-lain memandang tindakan Jepang tersebut sebagai tindakan yang diambil Jepang atau untuk mengimbangi kekuatan (melakukan *Balance of Power*).

F. Hipotesa

Dari pokok permasalahan yang dikemukakan di atas serta dengan menggunakan kerangka pemikiran teoritis yang dipakai maka dapat ditarik kesimpulan sementara sebagai hipotesa sebagai berikut:

1. Modernisasi pemerintahan baru Jepang dalam menentukan kebijaksanaan pertahanan keamanan secara profesional.
2. Peningkatan anggaran militer, pelaksanaan Konstitusi 47 dan Artikel 9 (menolak perang sebagai kedaulatan bangsa, menolak digunakannya kekuatan senjata dalam menyelesaikan pertikaian internasional dan tidak mengakui adanya potensi perang dan menyatakan taat pada 3 Prinsip Non Nuklir)
3. Pembentukan aliansi politik, militer dan ekonomi dengan Amerika Serikat dalam menentukan arah tujuan kebijaksanaan pertahanan keamanan Jepang.

G. Jangkauan Penelitian

Agar penulisan dalam skripsi ini tidak berlarut-larut, maka penulis membatasi kurun waktu akhir dekade 1980-an dan awal 1990-an. Namun tidak menutup kemungkinan menggunakan data-data dari tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya dapat menyesuaikan fakta di lapangan sepanjang masih relevan.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode "Penerapan Teori" atau metode deduktif yaitu kerangka teoritik yang telah disusun dideduksikan secara logis dalam hipotesa. Selanjutnya ini dari penulisan ini merupakan upaya memverifikasikan hipotesa dengan

makalah yang tidak diterbitkan dan harian).

I. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa Bab.

Bab I Merupakan Pendahuluan yang berisi Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Landasan Konseptual, Hipotesa, Metodologi Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan ini sendiri. Semuanya akan memberi gambaran singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Bab II Merupakan Gambaran Dinamika Politik Pertahanan Keamanan Jepang Pasca Perang Dunia II. Bab ini dimulai dengan gambaran Jepang pasca PD II kemudian diikuti dengan dua pilar kebijaksanaan pertahanan keamanan Jepang, beberapa prinsip kebijaksanaan pertahanan keamanan, politik pertahanan keamanan Jepang dan upaya peningkatan kemampuan pertahanan Jepang.

Bab III Merupakan pembicaraan mengenai situasi umum Asia Pasifik. Bab ini akan terdiri dari beberapa sub-bab; Situasi Keamanan Jepang, Persepsi Ancaman Keamanan Jepang dan hubungan Jepang dengan Lingkungan Regionalnya.

Bab IV Merupakan Pembahasan, akan membahas mengenai Kebijakan Pertahanan Keamanan Jepang Pada Masa Pasca Perang Dingin, mengenai faktor-faktor pendukung dan pengh:

Perang Dingin dan dengan tiga pilihan kebijaksanaan dan akhirnya gambaran mengenai skenario kebijaksanaan itu sendiri.

Bab V Merupakan kesimpulan dari seluruh penjelasan dan argumen dari bab-bab terdahulu.